

**ARAHAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG**

TUGAS AKHIR

Oleh:
SULISTIANTO
L2D 306 023



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

ABSTRAK

Kawasan pendidikan Tembalang sebagai salah satu kawasan fungsional di Kota Semarang merupakan lokasi yang menarik berbagai kegiatan baru baik sektor informal maupun sektor formal di wilayah sekitarnya. Keberadaan sektor informal berupa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL di kawasan pendidikan Tembalang selama beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, hal ini memicu adanya konflik kepentingan terutama dengan adanya penyerobotan ruang publik yang berakibat pada terganggunya sirkulasi di jalan raya, di trotoar maupun warga yang didepan rumahnya digunakan untuk berdagang oleh PKL. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan suatu studi untuk menentukan arahan penataan PKL di kawasan pendidikan Tembalang.

Studi ini memiliki tujuan untuk memberikan arahan penataan terhadap kegiatan sektor informal PKL di ruas jalan Kawasan pendidikan Tembalang yaitu Jl. Prof. Soedharto, SH Ngesrep (Zona perdagangan, jasa dan perkantoran) dan Jl. Prof. Soedharto, SH Tembalang (Zona Pendidikan dan Permukiman), Jl. Jatimulyo (Zona Pendidikan dan Permukiman), Jl. Tirtoagung (Zona Pendidikan dan Permukiman), Jl. Sirajudin, dan Jl. Banjarsari (Zona Perdagangan, jasa dan permukiman). Sehingga diharapkan keberadaan PKL yang saat ini belum terakomodasi dengan baik, dapat ditata agar harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Adapun komponen penataan PKL yang nantinya ditata di kawasan ini meliputi lokasi, tempat usaha, waktu berdagang, sarana fisik, jenis dagangan, pola persebaran dan pola pelayanan PKL.

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah Crosstab dan Distribusi Frekuensi, sedangkan teknik analisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis lokasi dan tempat usaha PKL menggunakan teknik analisis deskriptif dan distribusi frekuensi. Analisis karakteristik aktivitas PKL menggunakan alat analisis distribusi frekuensi dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis persepsi dan preferensi PKL, pengunjung PKL, warga sekitar (Lokasi yang diinginkan, Tempat usaha yang diinginkan, waktu berdagang yang diinginkan, sarana fisik yang diinginkan, jenis dagangan yang diinginkan, pola persebaran yang diinginkan, pola pelayanan yang diinginkan) menggunakan alat analisis crosstab, distribusi frekuensi dan teknik analisis deskriptif. Untuk analisis kebutuhan ruang dan penataan PKL menggunakan teknik analisis deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampling acak berlapis (SAB), dimana populasi PKL dibagi dalam empat stratum yaitu PKL makanan dan minuman, PKL sayur dan buah, PKL non makanan, PKL jasa. Masing-masing stratum diambil sampel untuk mewakili seluruh populasi PKL yang ada. Sampel pengunjung PKL diambil berdasarkan kunjungan ke PKL yang ada. Sedangkan sampel warga sekitar dilakukan berdasarkan lokasi tempat tinggal yang dekat dengan PKL.

Hasil studi diketahui bahwa pengelolaan lokasi PKL yang bisa dilakukan adalah dengan cara stabilisasi/pengaturan, cara yang ditempuh dengan menggunakan pembagian ruang PKL dan jalur pejalan kaki di trotoar sesuai dengan rencana jalan yang ada. Seluruh PKL yang saat ini berada dipinggir jalan ditata di trotoar berdampingan langsung dengan jalur pejalan kaki dengan dipisahkan oleh jalur hijau. Penataan yang ada terhadap komponen urban design dengan mengatur pola parkir on street. Lalu PKL yang berada di lokasi larangan di pindah tidak jauh dari lokasi semula. Kemudian lokasi larangan yang ada dibuat sebagai taman yang berfungsi sebagai upaya antisipasi terhadap kembalinya PKL ke lokasi semula. Ruang-ruang antisipasi tersebut diantaranya adalah ruang-ruang sejauh 60 meter dari mulut jalan/gang. Jenis dagangan dan sarana fisik dipertahankan sesuai dengan kondisi saat ini. Makanan/minuman menggunakan warung tenda, gerobak dorong, gerobak tenda, pikulan. Non makanan menggunakan kios, meja, gelaran. Bahan mentah (sayur dan buah) menggunakan mobil pick up dan PKL jasa menggunakan kios, gerobak. Bentuk ruang usaha yang disarankan adalah persegi panjang dengan pola mengikuti pola jalan yang ada. Pola tampilan disesuaikan dengan tampilan bangunan formal yang ada. Ukuran standar sarana fisik PKL ditentukan sesuai kebutuhan ruang tiap sarana fisik. Pengelompokan PKL dikelompokkan dengan satu jenis dagangan agar memudahkan konsumen memilih, pola pelayanan yang disarankan adalah pola menetap dengan waktu berdagang antara pukul 04.00-16.00 WIB (pagi-sore) dan 16.00-04.00 (sore-pagi) beberapa PKL juga diizinkan menggelar dagangannya sepanjang hari sesuai dengan lahan yang tersedia. Kesimpulan Penelitian diketahui bahwa lokasi PKL saat ini merupakan lokasi yang ramai lalu-lalang mahasiswa dan warga dari rumah/kos ke kampus, tempat usaha berada di trotoar dan pinggir jalan, jenis dagangan paling banyak adalah makanan/minuman, sarana fisik yang digunakan mayoritas adalah tenda dan gerobak, waktu berdagangan adalah siang dan malam hari, pola persebaran adalah dekat dengan PKL sejenis, pelayanan PKL adalah menetap, penataan PKL sesuai dengan UDGL yang telah dibuat.

Kata kunci: arahan penataan, PKL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada saat ini memiliki permasalahan yang sangat dilematis. Hal ini disebabkan karena pada satu sisi PKL mampu mengatasi masalah pengangguran secara keseluruhan, namun disatu sisi PKL mengakibatkan terganggunya aspek ketertiban umum yang menjadi salah satu syarat ideal suatu kota (Kurniadi dan Tangkisilan, 2006:1). Fenomena PKL sebagai suatu pekerjaan penting dan khas dalam sektor informal memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Kota untuk dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku untuk menjamin tertibnya kota.

Perkembangan PKL tidak pernah berhenti seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbul kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal (Kurniadi dan Tangkisilan, 2006: 5). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota untuk menghambat pertumbuhan PKL di Indonesia, salah satu paradigma lama yang masih sering digunakan oleh pemerintah adalah dengan tindakan pembongkaran maupun penggusuran terhadap PKL, namun yang terjadi kemudian adalah terjadinya perlawanan dari PKL yang merasa terancam kehilangan mata pencahariannya. Pendekatan pengendalian PKL yang dilakukan tersebut dirasa sudah tidak tepat untuk mengatasi permasalahan PKL dewasa ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa pendekatan baru, agar terjadi *win-win solution* baik bagi pemerintah, masyarakat maupun PKL sebagai bagian dari aktivitas ruang kota.

Saat ini sektor informal di daerah perkotaan menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Membengkaknya sektor informal memiliki kaitan dengan berkurangnya sektor formal dalam menyerap penambahan tenaga kerja di kota. Disisi lain penambahan angkatan kerja sebagai akibat migrasi ke kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya terjadi pengangguran terutama di kalangan usia muda dan terdidik, yang diikuti membengkaknya sektor informal (Effendi, 1988:2)

PKL sebagai sektor informal perkotaan tumbuh tanpa terencana dan memiliki bentuk serta keragaman jasa pelayanannya, membuat karakter PKL menjadi beragam pula masalah yang timbul di wilayah berdagangnya. Setiap PKL akan memiliki tingkat gangguan berbeda terhadap kepentingan publik bilamana dia menetap ataupun bilamana PKL berpindah-pindah tempat. Permasalahan umum yang terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia adalah bahwa sektor

informal seperti PKL sering tidak diperhitungkan atau terpinggirkan dalam penataan ruang, sehingga seringkali PKL tidak memiliki alokasi ruang khusus yang mengakibatkan PKL sering berbenturan dengan ruang publik.

Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah saat ini pertumbuhan kotanya sedang menuju ke arah kota metropolitan. Dengan kondisi demikian, tidak dapat dipungkiri apabila arus migrasi ke Kota Semarang terus mengalir, karena Semarang memiliki banyak kawasan fungsional yang mampu menarik orang dari berbagai daerah di luar Semarang untuk datang. Tentu saja hal ini pula akan menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja baik formal maupun sektor informal. Semarang seperti halnya kota lain belum seluruhnya menyediakan ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di ruang publik. Salah satu wilayah yang sedang berkembang pesat adalah pada kawasan pendidikan di Tembalang yang lokasinya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang.

Kawasan pendidikan Tembalang sebagai salah satu kawasan fungsional di Kota Semarang merupakan lokasi yang menarik berbagai kegiatan baru baik sektor informal maupun sektor formal di wilayah sekitarnya. Keberadaan sektor informal berupa PKL di kawasan pendidikan Tembalang selama beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, hal ini memicu adanya konflik kepentingan terutama dengan adanya penyerobotan ruang publik yang berakibat pada terganggunya sirkulasi di jalan raya, di trotoar maupun warga yang didepan rumahnya digunakan untuk berdagang oleh PKL. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa arah yang pada akhirnya nanti akan menambah kacaunya pemanfaatan ruang publik yang berbenturan dengan lokasi PKL.

Bagaimanapun keberadaan PKL di Tembalang merupakan sebuah hal dilematis yang pada satu sisi diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa setiap harinya. Namun di sisi lain, banyak PKL yang menggunakan ruang publik dan tidak memperhatikan atau mengabaikan bahwa ruang mereka berdagang merupakan fasilitas publik yang seharusnya tidak digunakan seluruhnya untuk area berdagang. Hal tersebut menjadi dasar diperlukannya suatu studi untuk menentukan arahan penataan aktivitas PKL di kawasan pendidikan Tembalang, agar pada akhirnya nanti PKL di kawasan Pendidikan Tembalang lebih tertata dan secara estetika tidak menjadikan citra buruk bagi kawasan Pendidikan Tembalang.

Menurut D.K. Ching (2000: 320) penataan sendiri didasarkan pada bentuk dan ruang terhadap suatu bangunan. Penataan tidak hanya berupa aturan geometrik, tetapi lebih ke kondisi dimana setiap bagian dari keseluruhan komposisi yang masih saling berhubungan, sehingga menghasilkan suatu hubungan yang harmonis. Arah penataan PKL di kawasan pendidikan Tembalang sendiri bukan hanya mengarah pada bentuk dan sarana fisik dagangan saja, tetapi juga terhadap penataan non fisik di sekitar PKL. Penataan PKL tersebut nantinya juga diarahkan ke

dalam lokasi maupun tempat berdagang yang diperbolehkan untuk digunakan oleh PKL yang diatur sesuai dengan kebutuhan ruang minimum masing-masing PKL menurut jenisnya serta mengacu pada Peraturan Daerah yang ada. Dengan demikian arahan penataan PKL ini diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan PKL yang banyak dimunculkan di kota-kota besar, serta sebagai salah satu solusi untuk mengakomodir berbagai kepentingan, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara PKL dengan masyarakat.

Studi ini merupakan studi lanjutan dari Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pendidikan Tembalang dimana dalam studi tersebut telah diketahui karakteristik berlokasi serta spot-spot yang lokasi yang berpotensi untuk berkembangnya PKL, sehingga diperlukan arahan penataan PKL yang lebih detail. Yaitu dimulai dari perencanaan, perancangan, tinjauan terhadap Perda agar permasalahan yang ada dapat diatasi serta sejalan dengan aspek hukum yang ada. Adapun penataan PKL di kawasan pendidikan Tembalang meliputi penataan terhadap lokasi, tempat usaha PKL, waktu berdagang, sarana fisik PKL, jenis dagangan, pola persebaran, pola pelayanan, pola pengelolaan lokasi PKL, bentuk dan massa bangunan yang menyesuaikan bangunan formal (bentuk fisik, ketinggian, tampilan warna, bahan), sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung. Wilayah studi meliputi Jl. Prof. Soedharto, SH, Jl. Tirtogunung, Jl. Jatimulyo, Jl. Sirajudin, dan Jl. Banjarsari.

1.2. Rumusan Permasalahan

Bagi masyarakat ataupun konsumen, keberadaan PKL akan sangat membantu dalam menyediakan berbagai bentuk barang maupun pelayanan. Kecenderungan ini muncul karena keberadaan PKL adalah akibat dari sektor formal yang memberikan ruang kepada sektor informal seperti PKL (De Soto dalam Alisjahbana, 1991: 58). PKL muncul di semua ruang publik yang masih ada ruang untuk dijadikan ruang usaha bagi PKL. Hal tersebut merupakan karakter dari PKL yang selalu menggunakan ruang publik untuk melangsungkan usahanya.

Terlepas dari keberadaan PKL yang dianggap membantu ataupun mengganggu. PKL selalu dikaitkan dengan ketertiban umum. Hal tersebut muncul akibat dari karakter PKL yang menggunakan ruang publik dan tumbuh tidak terkendali, sehingga rawan terhadap konflik kepentingan antara masyarakat ataupun PKL. Hal tersebutlah yang dikhawatirkan timbul di Kawasan Pendidikan Tembalang pada masa yang akan datang, yang kemungkinan dapat timbul seiring pertambahan jumlah penduduk di Kawasan Pendidikan Tembalang. Kondisi PKL sebagai sektor informal yang tidak terakomodasi dalam rencana tata ruang yang ada, sehingga permasalahan yang timbul saat ini di kawasan pendidikan Tembalang diantaranya:

- Belum terwadahnya PKL dalam ruang alokasi khusus ruang PKL menyebabkan sebagian atau keseluruhan jalur pejalan kaki (trotoar) sebagai sebagai tempat usaha PKL, mengakibatkan